



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka	16
1. Tinjauan tentang Politik Hukum	16
2. Gambaran tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	18
3. Otonomi Daerah dan Ruang Lingkupnya.....	22
4. Prosedur Pembentukan Undang-Undang	29



5. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden	34
6. Dasar Hukum Proses Pembentukan Undang-undang	36
7. Analisis terhadap Mekanisme Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	37
B. Landasan Teori	55
1. Teori Negara Hukum.....	55
2. Teori Keadilan Substantif	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian	62
B. Jenis Penelitian	62
C. Analisis Data	64
D. Jalannya Penelitian	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	67
1. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	67
2. Pandangan dan Usulan Fraksi	69
B. Dampak Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Kewenangan Daerah terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas pada Daerah Penghasil	85
1. Dampak pada Periode Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	85
2. Dampak pada Periode Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	86



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
DAN GAS BUMI DALAM
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

ADITYA SAHUBURUA, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

3. Dampak pada Periode Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	87
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Skema Proses Pembentukan Undang-undang	29
2. 5 (Lima) Tahapan Prolegnas	30
3. Tahap Penyusunan RUU	31
4. Tahap Pembahasan Pembentukan Undang-undang	33
5. Skema Penyusunan, Penetapan dan Pengundangan RPP	35